

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,	BUPATI KLATEN,	BUPATI KLATEN,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;	Menimbang: a. bahwa perangkat daerah merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Klaten yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; b. bahwa dalam rangka upaya pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dengan keuangan daerah sehingga terdapat kesesuaian antara pemetaan klasifikasi,	Menimbang: a. bahwa perangkat daerah merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Klaten yang meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, perlu ada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tersebut; c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan

	<p>kodefikasi dan nomenklatur dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. bahwa pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Klaten telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;</p>	<p>Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

<p>Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016</p>	<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
---	---	--

<p>Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>		
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN.</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN.</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Klaten. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan</p>	<p>Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran</p>

<p>berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.</p> <p>6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.</p> <p>7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.</p> <p>8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Klaten.</p> <p>9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Klaten.</p> <p>10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Klaten.</p> <p>11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.</p> <p>12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.</p> <p>13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana</p>	<p>urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Klaten.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.</p> <p>7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.</p> <p>8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Klaten.</p> <p>9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Klaten.</p> <p>10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Klaten.</p> <p>11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan</p>	<p>Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
--	---	---

<p>teknis Dinas dan /atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>14. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.</p> <p>15. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih besar 800, dan untuk Kecamatan dengan beban kerja besar mempunyai nilai variabel lebih besar dari 600.</p> <p>16. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800, dan untuk Kecamatan dengan beban kerja kecil mempunyai nilai variabel kurang/sama dengan 600.</p> <p>17. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban</p>	<p>ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.</p> <p>12. Dihapus.</p> <p>13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan /atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p>14. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.</p> <p>15. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih besar 800, dan untuk Kecamatan dengan beban kerja besar mempunyai nilai variabel lebih besar dari 600.</p> <p>16. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800, dan untuk Kecamatan dengan beban kerja kecil</p>	
--	--	--

<p>kerja kecil yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.</p>	<p>mempunyai nilai variabel kurang/sama dengan 600.</p> <p>17. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan daerah bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan olah raga; 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang Pariwisata; 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang Pariwisata; 3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

<p>4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;</p> <p>8. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;</p> <p>9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian,</p>	<p>4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;</p> <p>8. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perdagangan;</p>	<p>bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</p> <p>7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;</p> <p>8. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perdagangan;</p> <p>9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi;</p> <p>10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;</p> <p>11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan</p>
---	---	--

<p>bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi;</p> <p>10. Dinas Komunikasi Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;</p> <p>11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</p> <p>13. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;</p> <p>15. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang ketahanan pangan, dan bidang perikanan;</p>	<p>9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi;</p> <p>10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;</p> <p>11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman serta bidang pertanahan;</p> <p>12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;</p> <p>13. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;</p> <p>15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan,</p>	<p>urusan pemerintahan bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman serta bidang pertanahan;</p> <p>12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;</p> <p>13. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;</p> <p>14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;</p> <p>15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;</p> <p>16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan</p> <p>17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.</p> <p>e. Badan Daerah terdiri atas :</p> <p>1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A</p>
--	--	---

<p>16. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;</p> <p>17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;</p> <p>e. Badan Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 	<p>bidang pertanian dan bidang perikanan;</p> <p>16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan</p> <p>17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.</p> <p>e. Badan Daerah terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan 	<p>melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
---	---	--

	bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan sub urusan bencana.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Kecamatan Tipe A sebagai Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 26 (dua puluh enam) Kecamatan, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Prambanan; b. Kecamatan Gantiwarno; c. Kecamatan Wedi; d. Kecamatan Bayat; e. Kecamatan Cawas; f. Kecamatan Trucuk; g. Kecamatan Kebonarum; h. Kecamatan Jogonalan; i. Kecamatan Manisrenggo; j. Kecamatan Karangnongko; k. Kecamatan Ceper; l. Kecamatan Pedan; m. Kecamatan Karangdowo; n. Kecamatan Juwiring; o. Kecamatan Wonosari; p. Kecamatan Delanggu; q. Kecamatan Polanharjo; r. Kecamatan Karanganom; 		

<p>s. Kecamatan Tulung; t. Kecamatan Jatinom; u. Kecamatan Kemalang; v. Kecamatan Ngawen; w. Kecamatan Kalikotes; x. Kecamatan Klaten Utara; y. Kecamatan Klaten Tengah; z. Kecamatan Klaten Selatan.</p> <p>(3) Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, huruf x, huruf y dan huruf z dibentuk Kelurahan sebagai perangkat kecamatan.</p> <p>(4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:</p> <p>a. Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom. b. Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara; c. Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara; d. Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah; e. Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah; f. Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah; g. Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah; h. Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah;</p>		
--	--	--

<p>i. Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah; j. Kelurahan Gayampri, Kecamatan Klaten Selatan;</p>		
<p>Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>BAB III PEMBENTUKAN UPT Pasal 5 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPT. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan induknya.</p>	<p>4. Ketentuan judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB III PEMBENTUKAN UPTD 18. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD. (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan</p>	

	sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan induknya.	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Satuan Pendidikan Daerah berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPT berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.</p> <p>(2) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV STAF AHLI Pasal 8</p> <p>Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 9</p>		

<p>Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p> <p>(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.</p>	<p>5. Pasal 10 dihapus.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya</p>	<p>6. Pasal 11 dihapus.</p>	

<p>sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang telah ada dan terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; b. Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada dan terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya UPT rumah sakit yang diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. UPT Dinas yang telah ada dan terbentuk sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berkedudukan sebagai UPT Dinas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pembentukan UPT berdasarkan Peraturan Daerah ini. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>		

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.		
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten; b. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten; c. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten; d. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten; e. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten; 		

<p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten;</p> <p>i. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten;</p> <p>j. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Klaten;</p> <p>k. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan</p>		
---	--	--

<p>Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten;</p> <p>l. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten;</p> <p>m. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten;</p> <p>n. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;</p> <p>o. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten;</p> <p>p. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten;</p> <p>q. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor</p>		
--	--	--

<p>Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten;</p> <p>r. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;</p> <p>s. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Klaten;</p> <p>t. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Klaten;</p> <p>u. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;</p> <p>v. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;</p> <p>w. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;</p>		
--	--	--

<p>x. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten;</p> <p>y. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Klaten;</p> <p>z. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Klaten;</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :</p> <p>a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah “Bagas Waras” Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 115); dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

	<p>b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.</p> <p>(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten pada tanggal 15 Oktober 2016 Pih. BUPATI KLATEN, ttd SRI HARTINI	Ditetapkan di Klaten pada tanggal 26 Agustus 2021 BUPATI KLATEN, ttd SRI MULYANI	Ditetapkan di Klaten pada tanggal 20 Juli 2023 BUPATI KLATEN, ttd SRI MULYANI
Diundangkan di Klaten pada tanggal 1 November 2016	Diundangkan di Klaten pada tanggal 26 Agustus 2021	Diundangkan di Klaten pada tanggal 1 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, ttd JAKA SAWALDI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, ttd JAKA SAWALDI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, ttd JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 8	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 7	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 8
--	--	--